

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian didapat biaya operasional kendaraan untuk koridor I BOK standart Rp. 7.958,09/bus-km , BOK subsidi hibah bus Rp. 7.116,92/bus-km BOK subsidi BBM Rp. 6.715,30 dan untuk koridor II BOK standart Rp. 7.550,11, BOK subsidi hibah bus Rp. 6.775,53, BOK subsidi BBM Rp. 6.318,24.
2. Besaran subsidi pada tahun 2018 untuk koridor I subsidi BBM Rp. 1,055,968,219.77 /tahun, subsidi penuh Rp. 1,119,121,159.77 /tahun, subsidi selisih biaya Rp. 628,919,159.77 dan koridor II subsidi BBM Rp. 1,090,123,900.87 /tahun subsidi penuh Rp. 1,169,023,480.87 /tahun, subsidi selisih biaya Rp. 593,055,980.87. Maka mekanisme subsidi BOK selisih operasional mempunyai kecenderungan untuk diterapkan pada bus Trans Sarbagita, karena pemerintah menanggung biaya yang lebih rendah dari skema pembiayaan yang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Warpani, S. 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 21, 2018, *Pedoman Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Angkutan Umum Trans Sarbagita*, UPT Trans Sarbagita, Denpasar.
- Puspitasari, R, 2018 , Analisis Subsidi Angkutan Umum Pedesaan Bagi Pelajar di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, vol. 20, no 2, pp. 93-106.
- Marjanto, 2016 , Analisis Subsidi Angkutan Pedesaan Melalui Biaya Oprasi Kendaraan (BOK) di Kabupaten Selemang, *Jurnal Teknik Sipil*, vol. 13, no 4, pp. 291-300.
- Suweda, I Wayan, Analisis Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Sarbagita Berdasarkan BOK, ATP dan WTP, *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, vol 16, no 1, pp 11-23.
- SK Dirjen No 687,2002, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur*, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Keputusan Gubernur Bali No. 2193, 2019, *Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2020*, Denpasar.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 89, 2002, *Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi*, Jakarta.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6, 2017, *Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 20, 2011, *Retribusi Pengujian Kendaraan*

Bermotor, Denpasar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111, 2013, *Perubahan Atas Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14, 1993, *Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 22, 2011, *Retribusi Izin Trayek*, Denpasar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82, 2018, *Jaminan Kesehatan*, Jakarta.

Peraturan Presiden RI No. 16 , 2009, *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Denpasar.

